Suara Pembaruan | Jumat, 21 Agustus 2015

Kebijakan Politik Hukum Dinilai Belum Jelas

[JAKARTA] Kegaduhan yang kerap terjadi sekarang ini tak lepas dari ketidakjelasan arah kebijakan politik hukum pemerintah. Hal ini yang menyebabkan kordinasi antara organ-organ negara tidak sinkron atau macet. Imbasnya, komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi diragukan.

"Sejauh ini belum ada sinyal dari pemerintah terkait komitmen pemberantasan korupsi. Ini disebabkan kebijakan politik hukumnya tidak jelas arahnya. Maka, pelaksanaan kebijakan politik hukum pemerintah oleh menteri, atau lebih spesifik lagi oleh dirjen, direktur, bahkan kasubdit menjadi tidak jelas," kata pakar hukum Frans Hendra Winarta, kepada *SP*, di Jakarta, Jumat (21/8).

Menurutnya, pemberian remisi terhadap 1.938 koruptor merupakan indikator dari ketiadaan arah kebijakan politik hukum. Padahal, bandar narkotika yang juga tergolong sebagai kejahatan luar biasa seperti korupsi dapat dieksekusi mati kendati menimbulkan kegaduhan yang menguras energi.

Dirinya juga mempertanyakan keinginan pemerintah yang cenderung mendorong penguatan sistem preventif korupsi ketimbang represif. Sebab, faktanya upaya melemahkan KPK tetap berjalan. Baik melalui ancaman pidana terhadap komisioner dan penyidiknya maupun mempersempit wewenang KPK melalui perubahan perundang-undangan.

Ketum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) yang sempat duduk sebagai anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) yang kini dibubarkan pemerintah itu juga mempertanyakan, mengapa diantara sembilan anggota Wantimpres tidak ada orang hukum yang kredibel, kompeten, dan teruji pengalamannya untuk memberi masukan kepada Presiden Jokowi.

"Kalau administrator ulung bisa menempatkan orang-orang terbaik duduk di tempat yang layak. Pak Harto, terlepas dari segala kontroversinya merupakan administrator ulung karena mampu memilih orang yang tepat, 'the right man on the right place'," ujarnya.



DOK SP

Frans Hendra Winarta

Contoh lain, lanjut Frans, sekitar 1960-an, Bung Karno pernah mengumpulkan 1.000 hakim dan berpidato untuk mengingatkan para hakim tidak hanya bertugas memberikan keadilan dan kebenaran melalui putusan di pengadilan namun berperan juga dalam melindungi revolusi Indonesia.

"Zamannya Pak Harto dan Bung Karno jelas politik hukumnya terlepas dari kontroversinya. Sekarang tidak jelas antara Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan MA pasti lain-lain kalau ditanya tujuan hukumnya mau ke mana," jelasnya.

Menurutnya, semangat penguatan sistem preventif dalam pemberantasan korupsi harus dilakukan dari pembenahan moralitas dan nasionalisme para penegak hukumnya. Pasalnya, hal itu merupakan faktor utama penyebab dunia penegakan hukum mengalami dekadensi moral.

"Pengadilan kita kan semakin rusak. Dulu orangnya pintar-pintar tapi menyelewengkan hukum kalau sekarang sudah bodoh menyelewengkan hukum pula. Maka kita harus kembali ke moralitas dan nasionalisme, ini yang seharusnya digalakkan karena bagian dari revolusi mental," jelasnya.

Dihubungi terpisah, pakar hukum dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Agustinus Pohan juga mengungkapkan hal yang sama. Tidak jelasnya kebijakan politik hukum menyebabkan sinergitas diantara lembaga penegak hukum tak berjalan optimal.

"Diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan nasionalisme bagi aparatur negara, sehingga dapat diharapkan berperan sebagai internal kontrol untuk mencegah korupsi dan kejahatan lainnya yang merugikan negara. Sinergitas, tampaknya dimaksudkan untuk menghentikan konflik diantara penegak hukum. Mungkin ini penyebab digantinya Menko Polhukam," ujar Pohan.

> **"Pengadilan kita kan semakin rusak. Dulu orangnya pintar-pintar tapi menyelewengkan hukum kalau sekarang sudah bodoh menyelewengkan hukum pula.**

Sementara itu, pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro berpendapat, pemerintahan Presiden Joko Widodo diwarnai kisruh berbagai partai politik yang haus kekuasaan.

Faktor kegaduhan politik ini dinilai memperburuk citra kepemimpinan Jokowi yang dianggap tidak dapat meredam konflik.

Siti melihat faktor politik juga menjadi kunci masalah ketidakpuasan masyarakat. Disamping permasalahan ekonomi yang juga mempersulit masyarakat.

"Gonjang ganjing politik tak akan berpengaruh besar kalau kondisi ekonomi tetap membaik. Masalahnya, tak mungkin juga perekonomian membaik kalau politiknya sangat gaduh," katanya.

Hal ini juga bisa diperburuk ketika kepemimpinan Jokowi tidak berpengaruh terhadap menteri dan birokrasinya. Melihat kondisi pemerintahan saat ini, kata dia, wajar masyarakat merasa tidak puas atas kebijakan yang dikeluarkan Jokowi.

Padahal pengelolaan yang baik dari segi ekonomi, politik serta hukum bisa memberikan kepastian dalam pemerintahan.

[E-11/W-12]